



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	12

Tanggal																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulan																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN MENTAWAI

DPRD dan Pemkab Kepulauan Mentawai Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyetujui penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Arti-

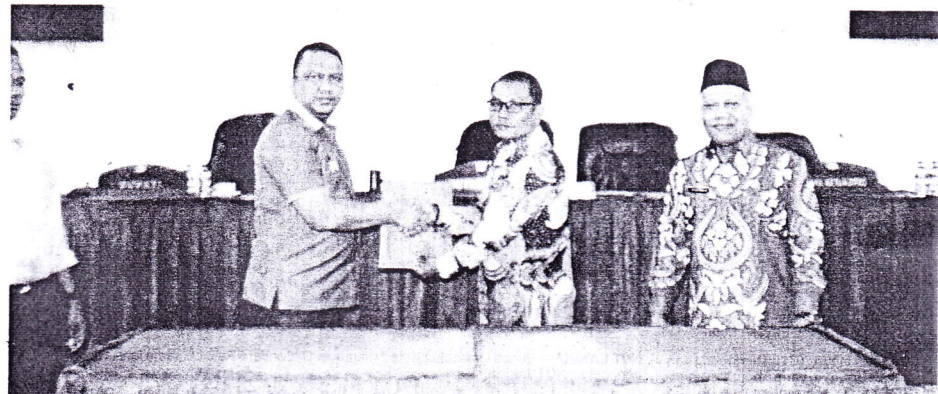
waban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 tersebut. "Terimakasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas persetujuan yang diberikan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Artinya,



PJ BUPATI Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak saat membacakan nota kesepakatan.

nya, seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2023 telah disepakati bersama oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD. Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini dilakukan di Aula Kantor DPRD Kepulauan Mentawai, Jumat (21/6). PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak mengucapkan terimakasih atas saran, kritikan, dan pertanyaan yang disampaikan selama masa pembahasan pertanggungja-

pusat maupun kebijakan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk mengkonfirmasi kebijakan-kebijakan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan. PJ Bupati menyampaikan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Namun terdapat 18 rekomendasi BPK untuk kita tindaklanjuti bersama-sama dalam waktu 60 hari



PJ BUPATI Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak menyerahkan nota kesepakatan kepada Ketua DPRD, Yosep Sarogdok.

sejak penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada tanggal 21 Mei 2024 yang lalu," ujar PJ Bupati.

"Dan pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi sesuai peraturan pe-

rundang-undangan yang berlaku dimasa yang akan datang sehingga kita dapat mempertahankan opini WTP," sambungnya.

Terakhir, kepada seluruh Anggota DPRD, PJ Bupati menyerahkan Nota Kesepakatan melalui Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan yang leb-

ih baik demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Akhirnya atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kejemihan hati dan pikiran, untuk bekerja dan mengabdikan diri di daerah yang kita cintai ini," pungk-

kas PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Yosep Sarogdok meminta agar pemerintah kabupaten segera menyerahkan Ranperda yang sudah disetujui tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penampaiannya kepada Gubernur Sumatera Barat, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, dapat segera dievaluasi oleh Gubernur," jelasnya. (***)



PJ BUPATI Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak menandatangani nota kesepakatan bersama Ketua DPRD, Yosep Sarogdok.



PJ BUPATI Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak menyerahkan nota kesepakatan kepada Ketua DPRD, Yosep Sarogdok.